

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
25 – 31 Mei 2020

LULUK'S UPDATE

MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI

**COP 26 Ditunda
Hingga 2021**

KTT Perubahan Iklim Ditunda Hingga 2021

- Para negosiator dari blok negara-negara berkembang juga mendesak sejumlah pemerintah untuk tidak menggunakan pandemi sebagai alasan penundaan rencana iklim yang lebih tegas, tetapi sebaliknya untuk meningkatkan energi terbarukan, kegiatan konservasi dan langkah-langkah peduli lingkungan lainnya sementara roda perekonomian mulai beroperasi kembali.
- KTT perubahan iklim pada tahun ini seharusnya menjadi tenggat waktu bagi pemerintah untuk berkomitmen pada tujuan pengurangan emisi yang lebih agresif, agar mencapai target dalam Perjanjian Paris. Dalam perjanjian tersebut, kenaikan suhu global dibatasi pada 2 derajat celcius dan 1,5 derajat celcius.

Implementasi Paris Agreement

Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement.

- Pada 29 Mei 2020 Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement.
- Menteri LHK berbicara tentang peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian target Perjanjian Paris, sebagaimana telah menjadi amanat UU Nomor 16 tahun 2016 mengenai Perubahan Iklim.

Virtual Ministerial Dialogue with Local and Regional Governments Strengthening Coordination to Implement the Paris Agreement.

- Acara diskusi internasional ini dihadiri oleh Menteri, Kepala Daerah dan champions dari berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Rusia, Inggris dan China. Serta diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai negara.
- Acara ini digelar oleh UN-Habitat bekerja sama dengan UNEP, UNDP, UCLG (United Cities and Local Governments), Global Taskforce of Local and Regional Governments, GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), dan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives).

Menteri LHK Siti Nurbaya

- Indonesia telah menerapkan kebijakan holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin.
- Indonesia juga memiliki kebijakan yang komprehensif mulai dari pemerintahan tingkat pusat sampai tingkat desa, dengan target kerja yang terukur untuk komitmen perjanjian Paris
- Pemerintah Pusat dalam hal ini KLHK memainkan peran koordinasi, pemantauan, dan pengawasan dalam implementasi Nationally Determined Contribution (NDC).
- Target penurunan emisi Indonesia hingga 2030 sebesar 29 persen dari Business as Usual (BAU) dengan upaya sendiri dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional.

**Menteri LHK
Siti Nurbaya**

- Sudah banyak inisiatif iklim lainnya dilakukan oleh pemangku kepentingan non-pihak (non-party) di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, termasuk kota dan kabupaten.

"Sebagai negara kepulauan, negara kesatuan, dengan sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan komprehensif, holistik dan integral dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional, yang memerlukan pendekatan antar-daerah, antar sektoral dan multi-disiplin"

Menteri LHK
Siti Nurbaya

- Saat ini proses finalisasi serta penyelesaian peta jalan NDC terus dipersiapkan dengan rinci. Pemerintah Indonesia juga melakukan koordinasi implementasi NDC di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor melalui berbagai peraturan yang memungkinkan koordinasi dan sinergi.
- Berbagai kebijakan dan tindakan terkait perubahan iklim juga telah berjalan seperti pendanaan anggaran nasional (budget tagging), penggunaan Dana Desa untuk mendukung Program Kampung Iklim (PROKLIM) dan aksi iklim yang dilakukan oleh kota dan kabupaten.

**Menteri LHK
Siti Nurbaya**

- Dukungan Norwegia melalui agenda REDD+ dan proyek Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur yang didukung oleh Bank Dunia merupakan contoh-contoh sinergi yang baik antara pemerintah nasional dan sub nasional, termasuk kabupaten dan kota serta masyarakat untuk melaksanakan Perjanjian Paris.
- Pada tahun 2019, subjek perubahan iklim dan manajemen bencana telah ditetapkan sebagai arus utama dalam rencana pembangunan nasional (RKP) tahunan.
- "Hal ini menjadikan isu perubahan iklim, berada setara dengan isu gender, jaring pengaman sosial dan pengentasan kemiskinan. Proses untuk meningkatkan keterlibatan kota dan kabupaten, serta pemangku kepentingan non-party lainnya sedang berlangsung"

Menteri LHK
Siti Nurbaya

- Sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam meningkatkan sinergi antar berbagai pihak, Indonesia sedang dalam proses menyelesaikan regulasi yang mencoba merealisasikan nilai ekonomi karbon.
- Selain itu, NDC yang sedang diperbarui dengan program dan tindakan adaptasi yang lebih kompleks, akan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan non-party, termasuk kota dan kabupaten, serta akar rumput dengan pengetahuan dan kearifan lokal mereka.
- "Instrumen kebijakan dan modalitas, pelajaran dan praktik terbaik yang telah dilaksanakan Indonesia diharapkan dapat menjadi pendukung pemulihan dari pandemi COVID-19 menuju kondisi sosial ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tahan iklim di masa depan"

Pembangunan Rendah Karbon

Bappenas Mendorong Pembangunan Rendah Karbon saat Fase New Normal

- Bappenas mendukung pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development Initiative/ LCDI) dalam fase kenormalan baru atau new normal, untuk meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang.
- Pembangunan rendah karbon di fase new normal dinilai mampu menghindari terjadinya kondisi kerentanan serta mendukung proses pemulihan sebagai transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan ke arah lebih baik.

**Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Bappenas
Arifin Rudiyanto**

- Diperlukan upaya pemulihan ekonomi dan sosial berbasis strategi kebijakan berkelanjutan, terutama implementasi pembangunan rendah karbon untuk mengantisipasi pemulihan perekonomian nasional dan dunia yang tinggi emisi (carbon intensive industries)
- Pemerintah menyadari perlunya terobosan kebijakan untuk mengatasi dampak krisis yang dihadapi saat ini. Upaya pemutusan penularan Covid-19, harus bisa disertai dengan tindakan pengamanan sosial dan kesehatan secara simultan serta intervensi ekonomi secara maksimal.
- Dengan begitu, perekonomian dan kehidupan sosial akan lebih cepat pulih dan kembali normal.

**Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Bappenas
Arifin Rudiyanto**

- Krisis ekonomi dan sosial yang disebabkan Covid-19 telah membawa perubahan mendasar pada prioritas pembangunan Indonesia. Fokus pembangunan sepanjang tahun ini pada penanggulangan pandemi, jaring pengaman sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan pada 2021, fokus akan berada pada arah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

**Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Bappenas
Arifin Rudiyanto**

- Bappenas menyoar pemulihan ekonomi yang berkelanjutan pascapandemi COVID-19 untuk meningkatkan ketangguhan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.
- Untuk itu tantangannya bagaimana pemulihan tersebut perlu dilakukan secara lebih berkelanjutan melalui pembangunan rendah karbon
- Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dilakukan karena belajar dari krisis keuangan tahun 2008-2009.
- Saat itu, proses pemulihan ekonomi justru memberi dampak lain yakni peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) secara global.

**Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Bappenas
Arifin Rudiyanto**

- Emisi CO2 secara global naik 5,9 persen tahun 2010 akibat percepatan pemulihan ekonomi yang memanfaatkan bahan bakar fosil.
- Dampaknya, akan mengakibatkan tinggi polusi dan tidak efisien karena menghasilkan karbon yang memberi dampak lebih lama.
- Peningkatan emisi pascakrisis ekonomi 2008-2009 disebabkan stimulus ekonomi dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi diarahkan pada industri tinggi karbon
- Sebagai gambaran, dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2021, pemerintah akan fokus dalam empat hal dalam pemulihan ekonomi yakni pariwisata, industri, investasi termasuk penguatan sistem ketahanan pangan.

**Deputi Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
Bappenas
Arifin Rudianto**

- Kemudian reformasi sistem kesehatan nasional, sistem perlindungan sosial dan sistem ketahanan bencana alam dan non-alam.
- Untuk jangka pendek, pemerintah fokus dalam menyelamatkan nyawa manusia dari dampak COVID-19.
- Setelah itu baru tata kembali bagaimana ekonomi bisa jalan, ekonomi bisa jalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon
- Pembangunan rendah karbon menjadi rencana jangka panjang yang dilakukan menengah dan tahunan.

**Duta Besar Inggris
untuk Indonesia dan
Timor-Leste
H.E. Owen Jenkins**

- pemerintah Inggris melalui UKCCU mendukung usaha bersama pemerintah Indonesia, dunia usaha dan sektor swasta untuk bersama-sama menanggulangi ancaman global. Ancaman itu baik berupa Covid-19 lingkungan dan perubahan iklim.
- “Pemerintah Inggris memahami bahwa pemulihan pasca-Covid-19 memerlukan dukungan nasional dan internasional, tidak hanya dari sisi keuangan, namun juga dari sisi pilihan kebijakan yang akan mendukung stimulasi pemulihan”
- Pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari build back better memberikan peluang investasi dan kebijakan yang dapat membantu menuju kepada masa depan lingkungan yang lebih bersih, hijau dan berkelanjutan pascapandemi COVID-19

**Duta Besar Inggris
untuk Indonesia dan
Timor-Leste
H.E. Owen Jenkins**

- Pemerintah Inggris memulai dengan langkah kedaruratan, pemulihan, lalu transformasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemilihan melakukan investasi hijau dan berkelanjutan menjadi hal penting dan jika kebijakan tersebut dilaksanakan dengan benar, krisis kesehatan yang berdampak luas saat ini juga dapat dilewati.
- Pemulihan pascapandemi COVID-19 tidak boleh mengorbankan upaya penanganan krisis iklim, sehingga akhirnya justru dapat menciptakan ekonomi yang berketahanan.
- Kebijakan dibuat untuk pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 sekaligus menangani ancaman perubahan iklim, termasuk melakukan manajemen sampah dan pemenuhan pangan berkelanjutan.

**Duta Besar Inggris
untuk Indonesia dan
Timor-Leste
H.E. Owen Jenkins**

- Godaan untuk kembali ke ekonomi tinggi karbon memang besar, namun Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang dikeluarkan Bappenas diyakini tidak akan mengembalikan ekonomi Indonesia ke masa sebelum pandemi terjadi, sehingga pembangunan rendah karbon akan membuat ekonomi lebih berkelanjutan.
- Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Tapi, upaya mengatasi perubahan iklim tetap harus dilakukan.
- Inggris menjadi negara pertama yang menetapkan target batas nol emisi dari energi berasal dari batu bara di 2025. Ada komite iklim independen yang akan mengawasi face-off tersebut, dan menggantinya dengan energi angin lepas pantai.

**Direktur Lingkungan
Hidup Bappenas
Medrilzam**

- Tak sekedar adopsi new normal, perlu kebijakan komprehensif yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang, untuk mengatasi ancaman bencana yang ada di depan mata, yaitu perubahan iklim.
- “Perlu kenormalan baru dengan membangun kembali Indonesia yang lebih baik (build back better) dengan mempertahankan momentum agenda pembangunan berkelanjutan 2030”
- Beberapa solusi pemulihan build back better dalam fase kenormalan baru, yaitu stimulus ekonomi jangka panjang harus di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (green jobs).

**Direktur Lingkungan
Hidup Bappenas
Medrilzam**

- Pandemi COVID-19 merupakan momen untuk menjalankan rencana pembangunan rendah karbon, membangun kembali dengan cara yang lebih baik untuk mewujudkan kenormalan baru.
- "Dunia sudah mengarah ke pembangunan rendah karbon. Jangan sampai Indonesia tertinggal dan tersalip karena di ASEAN saja Laos dan seterusnya mereka sudah mengarah ke sana juga. Kalau enggak sekarang kapan lagi,"
- Masa pandemi COVID-19 yang membuat kondisi lingkungan justru membaik karena polusi berkurang harus dimanfaatkan untuk menjalankan konsep membangun kembali dengan cara lebih baik.

**Direktur Lingkungan
Hidup Bappenas
Medrilzam**

- Lalu, menanggulangi perubahan iklim, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang.
- Kemudian mendorong stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif untuk menciptakan model bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan, pemanfaatan dana publik untuk investasi di sektor yang mendukung perekonomian sekaligus rendah emisi dan berkelanjutan.
- Mengintegrasikan risiko dan peluang iklim ke dalam sistem keuangan serta aspek-aspek penyusunan kebijakan publik dan infrastruktur.

**Direktur Lingkungan
Hidup Bappenas
Medrilzam**

- Di sisi lain, diperlukan pula solusi transisi dari pola business as usual yang tinggi emisi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.
- “Indonesia memiliki platform build back better untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, memperhatikan daya dukung lingkungan, serta mengintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon”

**Direktur Lingkungan
Hidup Bappenas
Medrilzam**

- Beberapa bukti ekonomi hijau dapat berkembang selaras dengan ekonomi ditunjukkan di Amerika Serikat, dimana pengembangan energi baru terbarukan (EBT) mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pemasukan yang meningkat dari tahun ke tahun.
- Negara Bagian Pennsylvania mampu menaikkan pendapatan hingga 460 juta dolar AS dan menciptakan 44.000 lapangan kerja baru dari EBT. Sedangkan di Britania Raya pada 2014 mampu mencapai pertumbuhan 2,6 persen walaupun emisi GRK menurun 8,4 persen dengan pengelolaan EBT.

**Rektor Institut
Pertanian Bogor
Arif Satria**

- Sekarang adalah momentum yang tepat untuk mengarusutamakan kebijakan pembangunan rendah karbon.

**Jurnalis lingkungan
senior
Brigitta Isworo
Laksmi**

- Pentingnya gerakan bersama untuk menjalankan pembangunan rendah karbon.
- Solusi harus dipikirkan untuk mengatasi urusan politik supaya tidak mengganggu jalannya pembangunan rendah karbon, mengingat begitu ganti pemerintahan Indonesia biasanya "poco ke kiri dan ke kanan".

**Direktur Eksekutif
Masyarakat Energi
Terbarukan Indonesia
Paul Butarbutar**

**Direktur Eksekutif
Center On Reforms
Economic Indonesia
Mohammad Faisal**

- pembangunan rendah karbon adalah keharusan dan Indonesia harus bergerak menuju ke sana sesuai dengan kesepakatan global.
- pembangunan rendah karbon sangat perlu dilakukan karena kegiatan pembangunan harus sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan. Pentingnya konsistensi dalam menjalankan pembangunan rendah karbon karena prosesnya berjangka panjang.
- Akan ada kendala memang dalam pelaksanaannya, karena itu pembangunan rendah karbon itu harus diperkuat.

Ada 5 sektor yang dapat menopang proses pemulihan ekonomi dan sosial berbasis pembangunan rendah karbon.

Sektor ini antara lain di bidang pengelolaan sektor energi, transportasi umum, hutan, pertanian, dan limbah.

Sumber Berita

- <https://katadata.co.id/berita/2020/05/30/bappenas-dorong-pembangunan-rendah-karbon-saat-fase-new-normal>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1519965/bappenas-sasar-pembangunan-rendah-karbon-pasca-corona>
- https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/1521636/pembangunan-rendah-karbon-buka-peluang-investasi-pascapandemi-covid-19?utm_source=antaraneews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaraneews
- <https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/8N00X MEN-bappenas-bidik-pemulihan-ekonomi-berkelanjutan-usai-covid-19-berakhir>
- <http://www.koran-jakarta.com/karena-pandemi-pbb-tunda-ktt-iklim-selama-setahun/>
- <https://republika.co.id/berita/qb2zlf382/pbb-tunda-ktt-perubahan-iklim-hingga-2021>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1519965/bappenas-sasar-pembangunan-rendah-karbon-pasca-corona>
- <https://kumparan.com/kumparannews/menteri-lhk-pemda-berperan-penting-atasi-perubahan-iklim-1tVY4nlag0U/full>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1520808/pandemi-covid-19-momen-untuk-jalankan-pembangunan-rendah-karbon>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

